

## **SELF-DETERMINATION DAN TANGGUNG JAWAB MORAL DALAM KONFLIK INSTITUSIONAL: PERSPEKTIF PERSONALISME KAROL WOJTYŁA**

**Patricius Neonnub**

Universitas Katolik Widya Mandira  
Kupang, Indonesia

Korespondensi: [patrisneonnub@unwira.ac.id](mailto:patrisneonnub@unwira.ac.id)

---

Dikirim: 14 Maret 2025

Revisi: 13 Juni 2025

Diterima: 12 September 2025

---

### **ABSTRAK**

Konflik institusional sering dijelaskan melalui kategori struktural seperti kegagalan tata kelola, ketidakseimbangan kekuasaan, atau disfungsi organisasi. Pendekatan-pendekatan ini memang membantu menjelaskan kondisi sistemik yang memungkinkan konflik muncul, namun sering mengabaikan pertanyaan filosofis yang lebih mendasar: siapa sebenarnya agen moral dalam konflik institusional? Artikel ini berargumen bahwa penjelasan struktural tidak memadai tanpa dasar filosofis mengenai hakikat tindakan manusia. Dengan memanfaatkan dialog antara metafisika tindakan Thomistik dan personalisme Karol Wojtyła, artikel ini mengusulkan interpretasi alternatif terhadap konflik institusional sebagai momen penentuan diri moral (*self-determination*). Dalam tradisi Thomistik, tindakan moral (*actus humanus*) berakar pada kesatuan antara pengetahuan intelektual dan kehendak bebas, sehingga tanggung jawab moral terletak pada pribadi manusia, bukan pada struktur kolektif. Wojtyła memperdalam perspektif ini dengan menunjukkan bahwa tindakan manusia memiliki dimensi refleksif di mana individu tidak hanya bertindak di dunia, tetapi juga membentuk identitas moralnya melalui tindakan tersebut. Berdasarkan kerangka ini, artikel ini menunjukkan bahwa konflik institusional tidak dapat dipahami semata-mata sebagai gangguan organisasi, tetapi sebagai peristiwa moral di mana individu menghadapi ketegangan antara loyalitas institusional dan kesetiaan terhadap kebenaran. Dengan mengintegrasikan metafisika Thomistik dan personalisme Wojtyła, penelitian ini menawarkan interpretasi personalistik tentang konflik institusional yang menegaskan peran tak tergantikan dari agensi moral pribadi dalam kehidupan komunitas. Artikel ini menyimpulkan bahwa bahkan dalam struktur institusional yang paling kompleks sekalipun, tanggung jawab moral pada akhirnya kembali kepada pribadi manusia sebagai subjek tindakan bebas yang berorientasi pada kebenaran.

**Kata kunci:** konflik institusional; agensi moral; personalisme; Karol Wojtyła; metafisika tindakan Thomistik; tanggung jawab moral; kebaikan bersama

### ABSTRACT

*Institutional conflict is commonly explained through structural categories such as governance failure, power imbalance, or organizational dysfunction. While these approaches illuminate systemic conditions that enable conflict, they often overlook a more fundamental philosophical question: who is the true moral agent within institutional conflict? This article argues that structural explanations remain incomplete unless they are grounded in a philosophical account of human action. Drawing on the Thomistic metaphysics of action and the personalist philosophy of Karol Wojtyła, the paper proposes an alternative interpretation of institutional conflict as a moment of moral self-determination. In the Thomistic tradition, moral action (*actus humanus*) arises from the unity of intellectual knowledge and free will, which situates moral responsibility in the human person rather than in collective structures. Wojtyła deepens this insight by showing that human action possesses a reflexive dimension through which individuals not only act in the world but also shape their own moral identity. Building on this framework, the article argues that institutional conflicts should not be understood merely as organizational disruptions but as moral events in which individuals confront the tension between institutional loyalty and fidelity to truth. By integrating Thomistic metaphysics and Wojtylian personalism, this study offers a personalist interpretation of institutional conflict that highlights the irreducible role of personal moral agency within communal life. The article concludes that even within complex institutional structures, moral responsibility ultimately returns to the human person as the subject of free and truthful action.*

**Keywords:** *institutional conflict; moral agency; personalism; Karol Wojtyła; Thomistic philosophy; moral responsibility; common good*

### PENDAHULUAN

Konflik dalam institusi baik dalam organisasi religius, politik, maupun sosial—sering dijelaskan melalui kerangka struktural. Dalam literatur organisasi dan etika sosial, konflik biasanya dipahami sebagai akibat dari kegagalan manajemen, ketidakseimbangan kekuasaan, atau kelemahan mekanisme tata kelola. Analisis semacam ini menempatkan perhatian utama pada mekanisme institusional yang dianggap bertanggung jawab atas terjadinya konflik. Dengan demikian, konflik diperlakukan terutama sebagai persoalan sistem organisasi yang perlu diperbaiki melalui reformasi struktural, perubahan prosedur, atau penyesuaian kebijakan.

Pendekatan ini mencerminkan kecenderungan yang lebih luas dalam masyarakat modern untuk memahami tindakan sosial melalui kategori sistemik. Institusi sering diperlakukan sebagai aktor kolektif yang mampu bertindak, mengambil keputusan, dan bahkan memikul tanggung jawab moral. Dalam kerangka ini, organisasi tidak hanya menjadi konteks bagi tindakan manusia, tetapi juga dianggap sebagai subjek yang dapat menghasilkan tindakan moral secara kolektif. Namun asumsi ini menimbulkan pertanyaan filosofis yang mendasar: siapa sebenarnya agen moral dalam konflik institusional?

Dalam diskursus etika kontemporer, pertanyaan ini sering dibahas melalui konsep

## **SELF-DETERMINATION DAN TANGGUNG JAWAB MORAL DALAM KONFLIK INSTITUSIONAL: PERSPEKTIF PERSONALISME KAROL WOJTYŁA**

*collective responsibility* atau *corporate moral agency*. Sejumlah filsuf berargumen bahwa organisasi dapat dipahami sebagai agen moral karena mereka memiliki struktur keputusan internal yang memungkinkan tindakan kolektif yang relatif independen dari individu-individu yang membentuknya (French, 1984; List & Pettit, 2011). Dalam perspektif ini, organisasi dipandang memiliki bentuk rasionalitas kolektif yang memungkinkan mereka membentuk niat bersama, mengambil keputusan, dan bertindak secara moral sebagai suatu kesatuan. Pendekatan tersebut bertujuan menjelaskan bagaimana tanggung jawab moral dapat muncul dalam sistem sosial yang kompleks, di mana tindakan individu sering kali terjalin dalam mekanisme organisasi yang luas.

Namun gagasan tentang agensi moral kolektif juga menghadapi sejumlah keberatan ontologis yang serius. Jika tindakan moral memerlukan kesadaran reflektif, kehendak bebas, dan kapasitas untuk memahami kebenaran moral, maka muncul pertanyaan apakah entitas kolektif seperti organisasi benar-benar dapat memenuhi syarat tersebut. Kritik terhadap teori agensi kolektif sering menekankan bahwa organisasi tidak memiliki pengalaman subjektif atau kesadaran moral yang menjadi dasar tindakan manusia. Dalam perspektif ini, atribusi tanggung jawab kepada organisasi lebih tepat dipahami sebagai konstruksi praktis atau legal daripada sebagai realitas ontologis dari tindakan moral (Hess, 2025; López González, 2024).

Perdebatan ini pada akhirnya membawa kita kembali kepada persoalan yang lebih mendasar dalam filsafat tindakan manusia: hubungan antara kebebasan, kebenaran, dan tanggung jawab moral. Dalam tradisi filsafat klasik, terutama dalam metafisika tindakan yang dikembangkan oleh Thomas Aquinas, tindakan manusia dipahami sebagai *actus humanus*, yaitu tindakan yang berasal dari pengetahuan intelektual dan kehendak bebas. Tindakan semacam ini berbeda dari *actus hominis*, yaitu aktivitas yang terjadi dalam diri manusia tanpa keterlibatan refleksi rasional atau pilihan kehendak. Distingsi ini menunjukkan bahwa tanggung jawab moral pada akhirnya berakar pada pribadi manusia sebagai subjek tindakan, karena hanya pribadi yang memiliki kapasitas untuk memahami kebenaran dan memilih kebaikan secara bebas (Aquinas, 1947; Brady, 2022).

Perspektif metafisika tindakan ini memperoleh elaborasi baru dalam personalisme Karol Wojtyła. Dalam karya filosofisnya *The Acting Person*, Wojtyła mengembangkan analisis fenomenologis tentang tindakan manusia yang berusaha mengintegrasikan pengalaman subjektif manusia dengan struktur ontologis tindakan dalam tradisi metafisika realistik. Menurut Wojtyła, manusia tidak hanya bertindak di dunia melalui

keputusan bebasnya, tetapi juga membentuk dirinya melalui tindakan tersebut. Ia menyebut proses ini sebagai *self-determination*, yaitu dinamika di mana manusia menentukan identitas moralnya melalui tindakan bebas (R. A. Spinello, 2023; Wojtyła, 2021). Dalam setiap tindakan moral, individu tidak hanya menghasilkan perubahan eksternal dalam dunia, tetapi juga menentukan siapa dirinya sebagai pribadi yang bertindak.

Kajian-kajian terbaru tentang personalisme Wojtyła semakin menegaskan pentingnya dimensi ini dalam memahami relasi antara pribadi dan komunitas. Burgos (2024a) menunjukkan bahwa konsep *common good* dalam pemikiran Wojtyła hanya dapat dipahami melalui partisipasi aktif pribadi dalam kehidupan komunitas tanpa kehilangan subjektivitasnya sebagai pribadi. Demikian pula Hołub (2025) menekankan bahwa antropologi Wojtyła memahami manusia sebagai kesatuan kompleks antara kesadaran, kebebasan, dan tanggung jawab moral yang tidak dapat direduksi menjadi fungsi sosial semata. Perspektif ini menunjukkan bahwa tindakan manusia selalu terjadi dalam konteks komunitas, tetapi tanggung jawab moral tetap berakar pada pribadi sebagai agen tindakan.

Dalam konteks ini, konflik institusional dapat dilihat dalam cahaya yang berbeda dari pendekatan struktural yang dominan. Jika tindakan manusia bersifat *self-determinative*, maka konflik dalam institusi tidak dapat dipahami hanya sebagai benturan kepentingan atau kegagalan mekanisme organisasi. Konflik juga merupakan momen di mana individu dihadapkan pada pilihan moral yang menentukan hubungan mereka dengan kebenaran dan kebaikan. Dalam situasi konflik, individu sering dipaksa untuk memilih antara berbagai kemungkinan tindakan: mempertahankan stabilitas institusi, menjaga loyalitas terhadap struktur organisasi, atau mengungkapkan kebenaran yang mungkin mengguncang tatanan yang ada. Pilihan-pilihan tersebut bukan sekadar keputusan strategis yang berkaitan dengan efektivitas organisasi. Sebaliknya, pilihan tersebut merupakan momen pembentukan moral pribadi yang memperlihatkan bagaimana kebebasan manusia berhubungan dengan kebenaran.

Artikel ini berargumen bahwa konflik institusional tidak dapat dipahami secara memadai melalui teori tanggung jawab kolektif semata. Dengan membaca personalisme Wojtyła dalam dialog dengan metafisika tindakan Thomistik, konflik institusional dapat dipahami sebagai ruang *self-determination* moral di mana individu melalui tindakan bebas menentukan dirinya dalam relasi dengan kebenaran. Perspektif ini menunjukkan

## **SELF-DETERMINATION DAN TANGGUNG JAWAB MORAL DALAM KONFLIK INSTITUSIONAL: PERSPEKTIF PERSONALISME KAROL WOJTYŁA**

bahwa meskipun institusi menyediakan kerangka sosial bagi tindakan manusia, tanggung jawab moral tidak pernah sepenuhnya dapat dipindahkan kepada sistem atau struktur organisasi. Pada akhirnya, tanggung jawab tersebut selalu kembali kepada pribadi manusia sebagai subjek tindakan moral.

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan filosofis-kualitatif dengan metode analisis konseptual dan sintesis teoretis. Fokus penelitian adalah menelaah kembali persoalan agensi moral dalam konflik institusional melalui analisis terhadap konsep tindakan manusia dalam metafisika Thomistik dan personalisme Karol Wojtyła. Analisis dilakukan melalui studi tekstual terhadap karya-karya utama Thomas Aquinas mengenai *actus humanus* serta karya Karol Wojtyła *The Acting Person*, yang kemudian didialogkan dengan literatur kontemporer tentang *collective moral agency* dan etika relasional.

Pendekatan ini bertujuan mengembangkan kerangka interpretatif filosofis untuk memahami konflik institusional sebagai peristiwa tindakan moral. Melalui sintesis konseptual antara metafisika tindakan Thomistik dan personalisme Wojtyła, penelitian ini menawarkan reinterpretasi konflik institusional sebagai ruang *self-determination* moral individu dalam kehidupan komunitas.

Penelitian ini memberikan kontribusi pada diskursus teologi moral dan filsafat sosial dengan menawarkan pembacaan personalistik terhadap konflik institusional. Dengan memanfaatkan dialog antara Thomas Aquinas dan Karol Wojtyła, artikel ini menegaskan kembali peran agensi moral pribadi dalam kehidupan komunitas, sekaligus menantang kecenderungan modern untuk mereduksi tanggung jawab moral ke dalam struktur institusional atau agensi kolektif.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **Batas-Batas Agensi Kolektif: Kritik terhadap Pendekatan Struktural**

##### **1. Teori Agensi Kolektif dan Problem Ontologis**

Dalam filsafat moral dan teori organisasi kontemporer, salah satu pendekatan yang paling berpengaruh untuk menjelaskan tanggung jawab dalam struktur sosial kompleks adalah teori *collective agency* atau *corporate moral agency*. Pendekatan ini muncul sebagai respons terhadap kenyataan bahwa banyak tindakan sosial modern tidak lagi dilakukan oleh individu yang terisolasi, melainkan melalui koordinasi sistematis

dalam organisasi besar seperti perusahaan, lembaga negara, atau institusi religius. Dalam konteks tersebut, tindakan yang memiliki konsekuensi moral sering kali merupakan hasil dari proses pengambilan keputusan kolektif yang melibatkan berbagai individu dalam struktur organisasi yang kompleks.

Peter French (1984) merupakan salah satu tokoh awal yang mengembangkan argumen bahwa organisasi dapat dipahami sebagai agen moral. Menurutnya, perusahaan atau institusi memiliki apa yang ia sebut sebagai *corporate internal decision structure* (CID structure), yaitu seperangkat prosedur dan mekanisme yang memungkinkan organisasi menghasilkan keputusan kolektif yang tidak dapat direduksi secara langsung kepada preferensi individu tertentu. Dalam kerangka ini, organisasi dapat dianggap sebagai agen yang mampu bertindak secara moral karena memiliki struktur keputusan yang memungkinkan terbentuknya tindakan kolektif yang relatif independen dari individu-individu yang membentuknya.

Argumen serupa dikembangkan lebih lanjut dalam teori *group agency* oleh List dan Pettit (2011). Mereka berpendapat bahwa kelompok dapat memiliki bentuk rasionalitas kolektif yang memungkinkan mereka membentuk preferensi dan keputusan yang berbeda dari preferensi individu anggota kelompok tersebut. Melalui mekanisme agregasi preferensi dan prosedur deliberasi bersama, suatu kelompok dapat menghasilkan apa yang disebut sebagai *group beliefs* dan *group intentions*. Dalam perspektif ini, kelompok bukan sekadar kumpulan individu, tetapi entitas yang memiliki kapasitas rasional tertentu yang memungkinkan mereka bertindak sebagai agen kolektif.

Pendekatan ini memiliki daya tarik teoretis yang besar karena mampu menjelaskan bagaimana tanggung jawab dapat dialokasikan dalam sistem sosial yang kompleks. Dalam banyak kasus praktis, seperti tanggung jawab korporasi atas kerusakan lingkungan atau keputusan politik yang dihasilkan oleh lembaga negara, atribusi tanggung jawab kepada organisasi tampak lebih memadai daripada membatasi tanggung jawab pada individu tertentu saja. Oleh karena itu, teori agensi kolektif sering digunakan untuk menjelaskan fenomena tanggung jawab dalam organisasi modern yang tidak dapat direduksi secara sederhana kepada tindakan individu.

Namun demikian, teori agensi kolektif juga menghadapi sejumlah kesulitan ontologis yang serius. Kritik utama terhadap pendekatan ini berangkat dari pertanyaan mengenai sifat dasar tindakan moral itu sendiri. Jika tindakan moral memerlukan kesadaran reflektif, kehendak bebas, dan kemampuan untuk memahami kebenaran moral,

## **SELF-DETERMINATION DAN TANGGUNG JAWAB MORAL DALAM KONFLIK INSTITUSIONAL: PERSPEKTIF PERSONALISME KAROL WOJTYŁA**

maka muncul pertanyaan apakah entitas kolektif seperti organisasi benar-benar memiliki kapasitas tersebut. Tanpa kesadaran subjektif atau pengalaman moral yang memungkinkan refleksi etis, sulit untuk menjelaskan bagaimana suatu organisasi dapat bertindak sebagai agen moral dalam arti yang sama seperti manusia.

Sejumlah filsuf kontemporer menekankan bahwa atribusi tanggung jawab kepada organisasi lebih tepat dipahami sebagai konstruksi praktis atau legal daripada sebagai realitas ontologis dari tindakan moral. Dalam perspektif ini, tanggung jawab kolektif berfungsi sebagai mekanisme sosial yang memungkinkan sistem hukum dan politik mengatur tindakan organisasi, tetapi tidak serta merta menunjukkan bahwa organisasi benar-benar memiliki kapasitas moral seperti individu manusia (Hess, 2025; Horowski, 2020). Dengan kata lain, teori agensi kolektif mungkin memiliki kegunaan praktis dalam konteks hukum atau kebijakan publik, tetapi kegunaan tersebut tidak otomatis membuktikan bahwa organisasi merupakan agen moral dalam arti ontologis.

Perdebatan ini menunjukkan bahwa persoalan agensi moral dalam organisasi tidak dapat diselesaikan hanya melalui analisis struktur keputusan kolektif. Pertanyaan yang lebih mendasar tetap harus dijawab: apa sebenarnya struktur tindakan yang memungkinkan tanggung jawab moral muncul? Tanpa menjawab pertanyaan ini, atribusi tanggung jawab kepada organisasi berisiko menjadi sekadar strategi konseptual yang berguna secara praktis tetapi tidak memadai secara filosofis.

### **2. Etika Relasional: Levinas dan Ricoeur**

Selain pendekatan struktural terhadap agensi kolektif, filsafat moral kontemporer juga menekankan dimensi relasional dari kehidupan etis. Dalam tradisi fenomenologi dan hermeneutika, tanggung jawab moral sering dipahami bukan terutama sebagai hasil dari struktur rasional atau prosedur organisasi, tetapi sebagai respons terhadap kehadiran orang lain dalam pengalaman manusia.

Salah satu kontribusi paling berpengaruh dalam arah ini adalah filsafat Emmanuel Levinas. Dalam karya klasiknya *Totality and Infinity*, Levinas (1969) berargumen bahwa etika berakar pada pertemuan dengan *the face of the Other*. Wajah orang lain menghadirkan tuntutan moral yang mendahului refleksi rasional maupun keputusan bebas individu. Dalam pengalaman pertemuan ini, individu dipanggil untuk bertanggung jawab atas kerentanan orang lain, sehingga tanggung jawab moral muncul sebagai respons terhadap kehadiran yang lain dalam pengalaman manusia. Pendekatan Levinas



memberikan kritik mendalam terhadap pemahaman moralitas yang terlalu menekankan rasionalitas prosedural atau struktur sistemik. Etika tidak pertama-tama muncul dari aturan atau institusi, tetapi dari relasi konkret antara manusia. Dalam kerangka ini, tanggung jawab moral tidak dapat dipahami sepenuhnya melalui bahasa organisasi atau mekanisme struktural, karena sumber etika terletak pada relasi antarpribadi yang mendahului sistem sosial.

Pendekatan fenomenologis terhadap tanggung jawab ini juga dikembangkan dalam filsafat Paul Ricoeur. Dalam karya *Oneself as Another*, Ricoeur (1992) memahami tindakan manusia dalam konteks narasi dan interpretasi. Bagi Ricoeur, kehidupan moral manusia selalu terjalin dalam proses interpretasi diri dan dunia melalui narasi. Konflik moral sering muncul sebagai *conflict of interpretations*, yaitu ketegangan antara berbagai cara memahami nilai dan tanggung jawab dalam kehidupan manusia.

Dalam kerangka Ricoeur, konflik tidak selalu dapat diselesaikan melalui prosedur rasional yang sederhana. Sebaliknya, konflik sering menuntut dialog interpretatif yang memungkinkan individu dan komunitas merefleksikan kembali makna tindakan mereka dalam konteks kehidupan bersama. Pendekatan ini memperlihatkan bahwa konflik moral sering memiliki dimensi hermeneutik yang tidak dapat direduksi menjadi persoalan struktur organisasi semata.

Pendekatan Levinas dan Ricoeur memberikan wawasan penting tentang dimensi relasional dan interpretatif dari konflik moral. Mereka menunjukkan bahwa tindakan manusia selalu terjadi dalam jaringan relasi dengan orang lain dan dalam konteks interpretasi makna yang kompleks. Namun kedua pendekatan tersebut tidak secara langsung menjelaskan struktur ontologis tindakan manusia yang memungkinkan tanggung jawab moral muncul. Dengan kata lain, mereka menyoroti relasi moral dan dinamika interpretatif tindakan manusia, tetapi tidak sepenuhnya menguraikan bagaimana tindakan bebas manusia membentuk identitas moral pelaku.

### **3. Keterbatasan Pendekatan Struktural dalam Memahami Konflik Institusional**

Jika teori agensi kolektif menekankan struktur organisasi dan fenomenologi etika menyoroti relasi antarpribadi, maka muncul pertanyaan apakah kedua pendekatan tersebut cukup memadai untuk menjelaskan konflik institusional. Dalam banyak kasus, konflik institusional tidak dapat dipahami hanya sebagai kegagalan mekanisme organisasi



## **SELF-DETERMINATION DAN TANGGUNG JAWAB MORAL DALAM KONFLIK INSTITUSIONAL: PERSPEKTIF PERSONALISME KAROL WOJTYŁA**

atau sebagai benturan interpretasi moral dalam komunitas. Konflik sering kali melibatkan keputusan pribadi yang memiliki konsekuensi moral yang mendalam bagi individu yang terlibat.

Pendekatan struktural cenderung menjelaskan konflik sebagai akibat dari kegagalan sistem organisasi: prosedur yang tidak efektif, distribusi kekuasaan yang tidak seimbang, atau mekanisme tata kelola yang tidak berjalan dengan baik. Analisis semacam ini memang mampu menjelaskan kondisi institusional yang memungkinkan konflik muncul. Namun pendekatan tersebut sering kali mengabaikan dimensi personal dari tindakan manusia yang berada di balik dinamika konflik tersebut.

Di sisi lain, pendekatan fenomenologis terhadap etika menyoroti dimensi relasional dan interpretatif dari tindakan moral, tetapi tidak selalu memberikan penjelasan yang memadai tentang bagaimana kebebasan manusia berhubungan dengan struktur tindakan moral itu sendiri. Tanpa analisis yang jelas tentang struktur ontologis tindakan manusia, sulit untuk menjelaskan bagaimana individu dapat bertindak secara moral dalam situasi konflik yang kompleks.

Keterbatasan ini menunjukkan bahwa persoalan konflik institusional tidak dapat diselesaikan hanya dengan memperluas analisis terhadap struktur organisasi atau relasi antarindividu. Sebaliknya, kita perlu kembali kepada pertanyaan yang lebih mendasar dalam filsafat tindakan manusia: bagaimana tindakan manusia memungkinkan tanggung jawab moral muncul?

Pertanyaan ini membawa kita kepada tradisi metafisika tindakan dalam filsafat klasik dan perkembangan personalisme dalam filsafat modern. Dalam tradisi ini, tindakan manusia dipahami sebagai tindakan bebas yang memiliki dimensi reflektif dan membentuk identitas moral pelaku. Perspektif semacam ini membuka kemungkinan untuk memahami konflik institusional bukan hanya sebagai fenomena struktural atau relasional, tetapi sebagai peristiwa tindakan manusia yang mengungkap hubungan antara kebebasan, kebenaran, dan komunitas.

Untuk mengembangkan perspektif ini, bagian berikutnya akan menelusuri fondasi filosofis tindakan manusia dalam dialog antara metafisika tindakan Thomistik dan personalisme Karol Wojtyła. Melalui pendekatan ini, konflik institusional dapat dipahami sebagai ruang *self-determination* moral di mana individu melalui tindakan bebas menentukan dirinya dalam relasi dengan kebenaran dan kebaikan.

## Fondasi Personalistik Tindakan Manusia

### 1. Struktur Ontologis Tindakan: Perspektif Thomistik

Setiap refleksi filosofis tentang tanggung jawab moral pada akhirnya harus berangkat dari analisis tentang hakikat tindakan manusia. Tanpa pemahaman yang jelas mengenai struktur tindakan, atribusi tanggung jawab moral berisiko menjadi sekadar konvensi sosial atau konstruksi institusional. Dalam tradisi metafisika realistik, terutama dalam filsafat Thomas Aquinas, tindakan manusia dipahami sebagai *actus humanus*, yaitu tindakan yang berasal dari pengetahuan intelektual dan kehendak bebas (Aquinas, 1947: ST I–II, q.1, a.1–2).

Distingsi klasik antara *actus humanus* dan *actus hominis* memainkan peran penting dalam kerangka ini. *Actus hominis* merujuk pada aktivitas yang terjadi dalam diri manusia tanpa keterlibatan refleksi rasional atau pilihan kehendak, seperti proses biologis atau refleks fisiologis. Sebaliknya, *actus humanus* adalah tindakan yang dilakukan secara sadar dan bebas oleh individu sebagai subjek rasional. Tindakan semacam ini melibatkan dua dimensi fundamental dari pribadi manusia: intelek yang mengenali kebenaran tentang kebaikan, dan kehendak yang secara bebas memilih untuk bertindak sesuai dengan kebaikan tersebut (Aquinas, 1947: ST I–II, q.18, a.2).

Konsekuensi filosofis dari distingsi ini sangat signifikan. Jika tindakan moral memerlukan pengetahuan dan kebebasan, maka tanggung jawab moral hanya dapat dilekatkan pada entitas yang memiliki kapasitas tersebut. Dengan kata lain, agensi moral secara inheren bersifat personal. Hanya pribadi manusia yang dapat bertindak sebagai subjek moral karena hanya pribadi yang memiliki kesadaran reflektif, kemampuan untuk mengenali kebenaran, dan kebebasan untuk memilih tindakan berdasarkan penilaian rasional.

Implikasi dari perspektif ini adalah bahwa institusi sosial tidak dapat dipahami sebagai agen moral dalam arti ontologis yang ketat. Institusi memang dapat memiliki struktur organisasi yang kompleks, prosedur pengambilan keputusan, dan mekanisme koordinasi yang memungkinkan tindakan kolektif. Namun struktur semacam itu tidak menghasilkan kesadaran reflektif yang memungkinkan tindakan moral dalam arti yang sebenarnya. Organisasi dapat memfasilitasi tindakan manusia, tetapi tidak dapat menggantikan pribadi sebagai subjek tindakan moral.

Perdebatan kontemporer mengenai *corporate moral agency* menunjukkan

## **SELF-DETERMINATION DAN TANGGUNG JAWAB MORAL DALAM KONFLIK INSTITUSIONAL: PERSPEKTIF PERSONALISME KAROL WOJTYŁA**

ketegangan antara kebutuhan praktis untuk mengatribusikan tanggung jawab kepada organisasi dan tuntutan ontologis mengenai sifat tindakan moral. Beberapa filsuf berusaha memperluas konsep agensi moral dengan menunjukkan bahwa organisasi dapat membentuk bentuk intensionalitas kolektif melalui mekanisme deliberasi bersama (List & Pettit, 2011). Pendekatan ini berupaya menunjukkan bahwa kelompok dapat memiliki preferensi dan keputusan yang tidak sepenuhnya dapat direduksi kepada preferensi individu.

Namun upaya semacam ini tetap menghadapi kesulitan ontologis yang mendasar. Tanpa pengalaman subjektif atau kesadaran reflektif, sulit untuk menjelaskan bagaimana kelompok dapat benar-benar memahami kebenaran moral atau memilih tindakan secara bebas. Oleh karena itu, sejumlah filsuf menekankan bahwa atribusi tanggung jawab kepada organisasi lebih tepat dipahami sebagai konstruksi praktis atau legal daripada sebagai realitas ontologis dari tindakan moral (Graff, 2024; Hess, 2025).

Dengan demikian, analisis metafisika tindakan menunjukkan bahwa meskipun konflik institusional terjadi dalam kerangka organisasi, tindakan yang membentuk konflik tersebut tetap merupakan tindakan manusia. Struktur sosial dapat mempengaruhi pilihan manusia, tetapi tidak menggantikan pribadi sebagai subjek tindakan. Oleh karena itu, setiap analisis konflik institusional yang ingin menjelaskan tanggung jawab moral harus kembali kepada struktur tindakan manusia itu sendiri.

### **2. Dimensi Refleksif Tindakan: Self-Determination dalam Personalisme Wojtyła**

Jika metafisika Thomistik menjelaskan struktur ontologis tindakan manusia, personalisme Karol Wojtyła memperdalam analisis tersebut dengan menyoroti dimensi refleksif tindakan manusia. Dalam karya filosofisnya *The Acting Person*, Wojtyła (Wojtyła, 2021) mengembangkan analisis fenomenologis tentang tindakan manusia yang berusaha mengintegrasikan pengalaman subjektif manusia dengan metafisika tindakan dalam tradisi realistik.

Salah satu kontribusi paling penting dari pemikiran Wojtyła adalah konsep *self-determination*. Menurutinya, tindakan manusia tidak hanya menghasilkan efek eksternal dalam dunia, tetapi juga memiliki efek internal terhadap pelaku. Melalui tindakan bebasnya, manusia tidak hanya mempengaruhi realitas eksternal tetapi juga menentukan dirinya sebagai pribadi moral. Dengan kata lain, manusia tidak hanya bertindak di dunia;

ia juga menjadi melalui tindakannya (Wojtyła, 2021).

Dimensi refleksif ini merupakan salah satu ciri khas tindakan manusia yang membedakannya dari proses kausal dalam dunia alam. Dalam setiap tindakan bebas, individu tidak hanya memilih suatu objek tindakan, tetapi juga menentukan dirinya sebagai subjek moral yang bertindak. Proses ini menjadikan tindakan manusia sebagai ruang pembentukan identitas moral pribadi.

Kajian-kajian terbaru tentang filsafat Wojtyła menegaskan kembali pentingnya konsep ini dalam memahami hubungan antara kebebasan dan pembentukan diri. Spinello (R. Spinello, 2024; R. A. Spinello, 2023) menunjukkan bahwa dalam pemikiran Wojtyła, kebebasan tidak hanya dipahami sebagai kemampuan memilih di antara berbagai alternatif, tetapi sebagai dinamika pembentukan diri melalui tindakan moral. Dengan demikian kebebasan manusia selalu memiliki dimensi personal yang berkaitan dengan perkembangan identitas moral individu.

Interpretasi serupa juga dikembangkan oleh Hołub (2025), yang menekankan bahwa antropologi Wojtyła memahami manusia sebagai kesatuan kompleks antara kesadaran, kebebasan, dan tanggung jawab moral. Dalam perspektif ini, tindakan manusia tidak dapat direduksi menjadi fungsi sosial atau respons terhadap struktur organisasi. Sebaliknya, tindakan manusia selalu melibatkan keputusan pribadi yang memiliki makna moral bagi pelaku.

Dalam konteks konflik institusional, dimensi refleksif tindakan ini menjadi sangat penting. Konflik sering memaksa individu untuk membuat keputusan yang memiliki konsekuensi moral yang serius. Pilihan tersebut tidak hanya menentukan arah konflik secara eksternal, tetapi juga membentuk identitas moral individu yang terlibat di dalamnya. Dengan demikian konflik institusional tidak hanya merupakan peristiwa organisasi, tetapi juga arena di mana proses *self-determination* manusia menjadi terlihat secara konkret.

### **3. Kebebasan dan Kebenaran dalam Tindakan Moral**

Dalam banyak teori modern tentang tindakan manusia, kebebasan sering dipahami sebagai kemampuan memilih di antara berbagai alternatif tanpa batasan eksternal. Dalam kerangka ini, kebebasan sering diidentifikasi dengan otonomi individu untuk menentukan tindakannya sendiri. Namun dalam tradisi metafisika realistik, kebebasan manusia tidak dapat dipisahkan dari hubungan manusia dengan kebenaran.

## **SELF-DETERMINATION DAN TANGGUNG JAWAB MORAL DALAM KONFLIK INSTITUSIONAL: PERSPEKTIF PERSONALISME KAROL WOJTYŁA**

Dalam filsafat Aquinas, kehendak manusia secara alami diarahkan pada kebaikan. Intelek berfungsi untuk mengenali kebenaran tentang kebaikan tersebut, sementara kehendak memilih tindakan yang dianggap baik berdasarkan penilaian intelektual tersebut. Dengan demikian kebebasan manusia tidak berarti kebebasan dari kebenaran, melainkan kebebasan untuk bertindak sesuai dengan kebenaran yang dikenali oleh intelek (Aquinas, 1947: ST I–II, q.6, a.1).

Wojtyła mengembangkan gagasan ini melalui analisis fenomenologis tentang kesadaran moral. Dalam pemikirannya, kebebasan manusia mencapai kepenuhannya ketika tindakan manusia berakar pada pengakuan terhadap kebenaran moral yang dipahami oleh hati nurani. Kebebasan yang terpisah dari kebenaran tidak lagi menjadi kebebasan dalam arti moral, tetapi berubah menjadi bentuk manipulasi atau dominasi (R. Spinello, 2024; R. A. Spinello, 2023; Wojtyła, 2021).

Hubungan antara kebebasan dan kebenaran ini memiliki implikasi penting bagi pemahaman konflik moral dalam kehidupan institusional. Konflik sering menghadapi individu pada pilihan antara berbagai kemungkinan tindakan yang masing-masing memiliki konsekuensi moral yang berbeda. Dalam situasi semacam ini, individu tidak hanya menghadapi persoalan strategis yang berkaitan dengan stabilitas organisasi atau kepentingan institusional. Sebaliknya, mereka dihadapkan pada pertanyaan moral yang lebih mendasar tentang hubungan mereka dengan kebenaran.

Dengan demikian konflik institusional sering menjadi situasi di mana hubungan antara kebebasan dan kebenaran menjadi sangat nyata. Individu dapat menghadapi tekanan untuk mempertahankan stabilitas organisasi atau menjaga loyalitas terhadap struktur institusional, bahkan ketika tindakan tersebut bertentangan dengan kebenaran yang mereka pahami. Dalam situasi semacam ini, konflik tidak lagi dapat dipahami hanya sebagai persoalan manajemen organisasi. Konflik menjadi peristiwa moral yang mengungkap dinamika kebebasan manusia dalam relasinya dengan kebenaran.

Fondasi filosofis ini memungkinkan kita untuk kembali kepada persoalan awal artikel ini dengan perspektif yang lebih mendalam. Jika tindakan manusia bersifat refleksif dan kebebasan selalu berkaitan dengan kebenaran, maka konflik institusional dapat dipahami sebagai ruang di mana dinamika tindakan moral manusia menjadi terlihat secara jelas. Bagian berikutnya akan menerapkan kerangka personalistik ini untuk memahami konflik institusional sebagai momen *self-determination* moral dalam kehidupan komunitas.

## Konflik Institusional sebagai Ruang *Self-Determination* Moral

### 1. Melampaui Penjelasan Struktural: Konflik sebagai Peristiwa Tindakan

Sebagian besar kajian tentang konflik institusional menjelaskan fenomena tersebut melalui kerangka struktural. Konflik dipahami sebagai akibat dari kegagalan tata kelola, distribusi kekuasaan yang tidak seimbang, atau mekanisme organisasi yang tidak berfungsi secara efektif (Kim, 2023; Pugu, 2025). Dalam perspektif ini, konflik diperlakukan terutama sebagai gangguan terhadap stabilitas sistem yang perlu diperbaiki melalui reformasi prosedural atau restrukturisasi organisasi. Pendekatan semacam ini memiliki nilai analitis karena mampu menjelaskan faktor-faktor sistemik yang mempengaruhi dinamika konflik dalam organisasi modern.

Namun pendekatan struktural sering kali memiliki keterbatasan mendasar. Dengan menempatkan fokus utama pada mekanisme institusional, analisis semacam ini cenderung mereduksi konflik menjadi persoalan prosedur atau manajemen organisasi. Konflik dipahami sebagai kegagalan sistem yang perlu diperbaiki melalui penyesuaian struktur atau kebijakan. Perspektif ini mengabaikan fakta bahwa konflik institusional pada akhirnya selalu melibatkan tindakan manusia yang konkret tindakan yang lahir dari keputusan individu yang berhadapan dengan tuntutan moral dalam situasi tertentu. Jika analisis dalam bagian sebelumnya benar bahwa tindakan manusia bersifat reflektif dan memiliki dimensi *self-determination*, maka konflik institusional tidak dapat dipahami hanya sebagai kegagalan sistem organisasi. Konflik juga merupakan peristiwa tindakan manusia, yaitu situasi di mana individu melalui keputusan bebasnya menentukan bagaimana ia akan bertindak dalam relasi dengan kebenaran dan kebaikan.

Dengan demikian konflik tidak hanya mengungkap dinamika kekuasaan dalam organisasi, tetapi juga memperlihatkan dinamika tindakan moral yang terjadi dalam kehidupan komunitas. Dalam perspektif ini, konflik institusional dapat dipahami sebagai momen di mana struktur organisasi tidak lagi mampu menyerap atau menutupi ketegangan moral yang ada dalam kehidupan komunitas. Ketika konflik muncul, individu tidak lagi dapat sepenuhnya bersembunyi di balik prosedur administratif atau mekanisme organisasi. Mereka dipaksa untuk menentukan bagaimana mereka akan bertindak sebagai pribadi yang bebas dan bertanggung jawab. Dengan kata lain, konflik memperlihatkan bahwa di balik setiap struktur sosial terdapat tindakan manusia yang tidak pernah sepenuhnya dapat direduksi menjadi fungsi sistem organisasi.

## **2. Loyalitas Institusional dan Tuntutan Kebenaran**

Salah satu dimensi paling kompleks dalam konflik institusional adalah hubungan antara loyalitas terhadap institusi dan kesetiaan terhadap kebenaran. Dalam banyak organisasi, loyalitas terhadap struktur institusional sering dipandang sebagai nilai moral yang penting karena memungkinkan kerja sama sosial yang stabil (Herminingsih, 2024). Tanpa loyalitas semacam ini, institusi tidak akan mampu mempertahankan kohesi internal yang diperlukan untuk mencapai tujuan bersama.

Namun loyalitas institusional juga dapat menimbulkan ketegangan moral ketika tuntutan organisasi bertentangan dengan kebenaran yang dipahami oleh individu. Dalam situasi semacam ini, individu dapat menghadapi dilema yang sulit: mempertahankan stabilitas institusi dengan menyesuaikan diri terhadap tuntutan organisasi, atau bertindak sesuai dengan kebenaran yang mereka pahami meskipun tindakan tersebut dapat mengguncang struktur institusional.

Dalam kerangka metafisika tindakan dan personalisme Wojtyła, dilema semacam ini tidak dapat diselesaikan hanya melalui pertimbangan strategis tentang stabilitas organisasi. Kebebasan manusia tidak menemukan kepenuhannya dalam kesetiaan buta terhadap struktur sosial, tetapi dalam tindakan yang selaras dengan kebenaran moral yang dikenali oleh hati nurani (Rassudina, 2019; Wojtyła, 2021). Dengan demikian loyalitas terhadap institusi tidak dapat dipisahkan dari orientasi terhadap kebenaran.

Ketegangan antara loyalitas institusional dan kebenaran moral sering menjadi pusat konflik dalam organisasi. Individu dapat menghadapi situasi di mana mempertahankan stabilitas institusi berarti mengabaikan kebenaran tertentu, sementara mengungkapkan kebenaran tersebut dapat menimbulkan konsekuensi yang serius bagi organisasi. Dalam situasi semacam ini, konflik tidak lagi sekadar persoalan strategi organisasi. Konflik menjadi persoalan moral yang menyentuh identitas pribadi pelaku, karena keputusan yang diambil akan menentukan hubungan individu dengan kebenaran dan dengan komunitas tempat ia hidup.

## **3. Partisipasi, Komunitas, dan Kebaikan Bersama**

Meskipun analisis sebelumnya menekankan dimensi personal dari tindakan moral, personalisme Wojtyła tidak mengarah pada individualisme moral yang memisahkan individu dari komunitas. Sebaliknya, Wojtyła menegaskan bahwa manusia hanya dapat memahami dirinya secara penuh dalam relasi dengan komunitas tempat ia



hidup. Kehidupan moral manusia selalu terjadi dalam konteks relasi sosial yang memungkinkan individu berpartisipasi dalam kehidupan bersama.

Dalam pemikiran Wojtyła, konsep kunci yang menjelaskan hubungan antara pribadi dan komunitas adalah *participation*. Partisipasi mengacu pada keterlibatan aktif pribadi dalam kehidupan komunitas tanpa kehilangan subjektivitasnya sebagai pribadi yang bebas (Arianto, 2024; Wojtyla, 2021). Melalui partisipasi, individu tidak hanya menjadi bagian dari struktur sosial, tetapi juga berkontribusi secara aktif dalam pencapaian *common good* atau kebaikan bersama (Burgos, 2024a; Espartinez, 2023). Dalam kerangka ini, komunitas yang autentik bukanlah komunitas yang menelan pribadi ke dalam struktur kolektif, melainkan komunitas yang memungkinkan individu berpartisipasi secara bebas dalam kehidupan bersama. Komunitas yang sehat memberikan ruang bagi kebebasan pribadi untuk berkembang dalam orientasi terhadap kebaikan bersama.

Konflik institusional sering muncul ketika hubungan antara pribadi dan komunitas mengalami ketegangan. Struktur organisasi dapat berkembang sedemikian rupa sehingga menuntut kepatuhan yang semakin besar dari individu tanpa memberikan ruang yang memadai bagi partisipasi pribadi dalam kehidupan komunitas. Ketika hal ini terjadi, individu dapat merasakan bahwa tindakan mereka sebagai pribadi tidak lagi sejalan dengan arah institusi tempat mereka berada.

Dalam situasi semacam ini, konflik dapat berfungsi sebagai momen refleksi moral bagi komunitas itu sendiri. Konflik dapat mengungkap apakah suatu komunitas benar-benar memungkinkan partisipasi pribadi dalam kebaikan bersama atau justru menuntut kepatuhan struktural yang menekan kebebasan moral individu. Dengan demikian konflik tidak hanya mengungkap ketegangan antara individu dan institusi, tetapi juga memperlihatkan bagaimana komunitas memperlakukan kebebasan moral anggotanya.

#### **4. Konflik sebagai Ujian Integritas Moral**

Dilihat dari perspektif personalisme Wojtyła, konflik institusional memiliki dimensi moral yang lebih dalam daripada sekadar benturan kepentingan atau kegagalan organisasi. Konflik sering menjadi ujian integritas moral bagi individu yang terlibat di dalamnya. Dalam situasi konflik, individu tidak lagi dapat sepenuhnya berlindung di balik struktur organisasi atau prosedur administratif. Mereka dipaksa untuk membuat keputusan yang mencerminkan hubungan mereka dengan kebenaran. Keputusan-

## **SELF-DETERMINATION DAN TANGGUNG JAWAB MORAL DALAM KONFLIK INSTITUSIONAL: PERSPEKTIF PERSONALISME KAROL WOJTYŁA**

keputusan semacam ini memiliki konsekuensi yang melampaui penyelesaian konflik organisasi. Melalui tindakan mereka, individu menentukan siapa mereka sebagai pribadi moral. Dalam bahasa personalisme Wojtyła, konflik menjadi momen *self-determination* di mana individu menentukan dirinya dalam relasi dengan kebenaran dan komunitas (Wojewoda, 2021; Wojtyła, 2021). Dalam konteks ini, konflik memiliki karakter paradoksal. Di satu sisi konflik dapat merusak stabilitas organisasi dan hubungan sosial dalam komunitas. Konflik sering menimbulkan ketegangan, ketidakpercayaan, dan bahkan perpecahan dalam institusi. Namun di sisi lain konflik juga dapat mengungkap dimensi moral tindakan manusia yang sering tersembunyi dalam situasi normal kehidupan institusional.

Ketika konflik terjadi, kebebasan manusia tidak lagi bersifat abstrak. Kebebasan menjadi kenyataan konkret yang terlihat dalam tindakan individu yang harus memilih bagaimana mereka akan bertindak dalam situasi yang sulit. Dalam situasi semacam ini, konflik memperlihatkan sesuatu yang sangat mendasar tentang kondisi manusia: bahwa tindakan moral selalu melibatkan keputusan pribadi yang tidak pernah sepenuhnya dapat dipindahkan kepada sistem atau struktur organisasi.

Dengan demikian konflik institusional tidak hanya harus dipahami sebagai masalah yang perlu diselesaikan secara administratif. Konflik juga harus dipahami sebagai peristiwa moral yang mengungkap hubungan antara kebebasan, kebenaran, dan komunitas dalam kehidupan manusia. Dalam perspektif personalistik, konflik memperlihatkan bahwa bahkan dalam struktur sosial yang paling kompleks sekalipun, tindakan moral tetap berasal dari pribadi manusia sebagai subjek yang bebas dan bertanggung jawab.

### **Implikasi Praktis dan Refleksi Kebijakan**

Analisis dalam bagian-bagian sebelumnya menunjukkan bahwa konflik institusional tidak dapat dipahami hanya melalui kerangka struktural atau mekanisme organisasi. Jika tindakan manusia memiliki dimensi *self-determination* dan tanggung jawab moral berakar pada pribadi sebagai subjek tindakan, maka pemahaman ini memiliki implikasi yang signifikan bagi bagaimana institusi dirancang, dipimpin, dan mengelola konflik internal. Perspektif personalistik terhadap tindakan manusia menggeser fokus dari stabilitas sistem semata menuju pengakuan terhadap kebebasan moral individu dalam kehidupan komunitas.

Implikasi semacam ini tidak berarti menolak pentingnya struktur organisasi atau tata kelola institusional. Institusi tetap memainkan peran penting dalam menyediakan kerangka sosial bagi tindakan manusia. Namun perspektif personalistik menunjukkan bahwa struktur organisasi tidak pernah dapat sepenuhnya menggantikan tanggung jawab moral individu. Oleh karena itu kebijakan institusional yang ingin menangani konflik secara efektif harus mempertimbangkan dimensi personal dari tindakan moral dalam kehidupan komunitas.

### **1. Kebijakan Institusi yang Menghargai Kebebasan Nurani**

Salah satu implikasi paling penting dari pendekatan personalistik adalah perlunya institusi mengakui peran kebebasan nurani dalam kehidupan organisasi. Jika tindakan moral selalu melibatkan keputusan pribadi yang berkaitan dengan kebenaran yang dipahami oleh individu, maka institusi tidak dapat menuntut kepatuhan mutlak terhadap struktur organisasi tanpa memperhatikan kebebasan moral anggotanya.

Dalam banyak organisasi modern, mekanisme tata kelola sering dirancang untuk memaksimalkan efisiensi dan stabilitas sistem. Namun pendekatan semacam ini dapat menciptakan tekanan struktural yang mendorong individu untuk menyesuaikan diri terhadap tuntutan organisasi bahkan ketika tuntutan tersebut bertentangan dengan penilaian moral pribadi. Dalam situasi semacam ini, konflik institusional sering muncul sebagai reaksi terhadap ketegangan antara kepatuhan struktural dan integritas moral individu.

Perspektif personalistik menunjukkan bahwa institusi yang sehat harus menyediakan ruang bagi kebebasan nurani individu. Hal ini dapat diwujudkan melalui kebijakan yang melindungi individu yang bertindak berdasarkan pertimbangan moral yang sah, seperti mekanisme pelaporan pelanggaran (*whistleblowing*) yang aman atau prosedur dialog internal yang memungkinkan anggota organisasi menyampaikan keberatan moral tanpa takut akan konsekuensi represif. Kebijakan semacam ini tidak hanya melindungi individu, tetapi juga membantu institusi menjaga integritas moralnya dalam jangka panjang.

### **2. Mediasi Konflik Berorientasi Tanggung Jawab Personal**

Implikasi kedua berkaitan dengan cara konflik institusional dikelola. Dalam banyak pendekatan manajemen konflik, penyelesaian konflik dipahami sebagai proses

### **SELF-DETERMINATION DAN TANGGUNG JAWAB MORAL DALAM KONFLIK INSTITUSIONAL: PERSPEKTIF PERSONALISME KAROL WOJTYŁA**

negosiasi antara kepentingan yang bersaing dalam organisasi. Pendekatan ini sering berfokus pada kompromi struktural yang memungkinkan organisasi kembali mencapai stabilitas.

Namun perspektif personalistik menunjukkan bahwa konflik institusional sering melibatkan dimensi moral yang tidak dapat sepenuhnya diselesaikan melalui kompromi struktural semata. Konflik sering muncul karena individu menghadapi dilema moral yang berkaitan dengan hubungan mereka dengan kebenaran dan dengan komunitas tempat mereka hidup. Oleh karena itu proses mediasi konflik tidak boleh hanya berfokus pada penyelesaian teknis atau prosedural.

Pendekatan yang lebih memadai adalah mediasi konflik yang berorientasi pada tanggung jawab personal. Dalam kerangka ini, proses penyelesaian konflik tidak hanya bertujuan memulihkan stabilitas organisasi, tetapi juga menciptakan ruang dialog di mana individu dapat merefleksikan tindakan mereka sebagai agen moral. Pendekatan semacam ini mendorong para pihak untuk mempertimbangkan dimensi moral dari tindakan mereka, bukan hanya konsekuensi strategis bagi organisasi.

Pendekatan ini sejalan dengan pandangan Wojtyła bahwa kehidupan moral manusia selalu melibatkan proses refleksi diri melalui tindakan bebas (Casas, 2018; Wojtyła, 2021). Konflik yang dikelola melalui dialog reflektif semacam ini dapat menjadi kesempatan bagi individu dan komunitas untuk memperdalam pemahaman mereka tentang tanggung jawab moral dalam kehidupan bersama.

### **3. Kepemimpinan dan Budaya Organisasi yang Partisipatif**

Implikasi ketiga berkaitan dengan peran kepemimpinan dalam kehidupan institusional. Jika konflik institusional sering menjadi momen *self-determination* moral bagi individu, maka gaya kepemimpinan yang dominan dalam organisasi dapat mempengaruhi bagaimana konflik tersebut berkembang.

Model kepemimpinan yang terlalu menekankan kontrol hierarkis sering kali memperkuat pendekatan struktural terhadap konflik. Dalam model semacam ini, konflik dipandang sebagai gangguan terhadap stabilitas organisasi yang harus segera diselesaikan melalui intervensi administratif. Pendekatan ini dapat mengabaikan dimensi moral dari konflik dan berisiko menekan kebebasan individu untuk bertindak sesuai dengan penilaian moral mereka.

Sebaliknya, perspektif personalistik menekankan pentingnya kepemimpinan yang

mendorong partisipasi pribadi dalam kehidupan komunitas. Kepemimpinan semacam ini tidak hanya berfokus pada efisiensi organisasi, tetapi juga pada pembentukan budaya institusional yang memungkinkan individu berpartisipasi secara aktif dalam pencapaian kebaikan bersama (*common good*) (Burgos, 2024b).

Dalam budaya organisasi yang partisipatif, konflik tidak selalu dipandang sebagai ancaman terhadap stabilitas institusi. Konflik juga dapat dilihat sebagai kesempatan bagi komunitas untuk merefleksikan kembali nilai-nilai yang menjadi dasar kehidupan bersama. Dalam konteks semacam ini, kepemimpinan berperan bukan hanya sebagai pengelola sistem organisasi, tetapi juga sebagai fasilitator dialog moral dalam kehidupan komunitas.

Dengan demikian perspektif personalistik terhadap konflik institusional tidak hanya menawarkan kerangka teoretis baru untuk memahami dinamika konflik dalam organisasi. Perspektif ini juga membuka kemungkinan bagi praktik-praktik kebijakan dan kepemimpinan yang lebih manusiawi, di mana institusi tidak hanya berfungsi sebagai sistem organisasi, tetapi juga sebagai ruang kehidupan moral bagi pribadi-pribadi yang berpartisipasi di dalamnya.

## KESIMPULAN

Artikel ini berangkat dari pertanyaan filosofis yang sederhana tetapi mendasar: siapa sebenarnya agen moral dalam konflik institusional? Banyak pendekatan dalam teori organisasi dan etika sosial menjelaskan konflik melalui kategori struktural kegagalan tata kelola, ketidakseimbangan kekuasaan, atau kerusakan mekanisme institusional. Analisis semacam ini memberikan wawasan penting mengenai kondisi sistemik yang memungkinkan konflik muncul. Namun seperti telah ditunjukkan dalam pembahasan sebelumnya, pendekatan tersebut sering kali mengabaikan dimensi yang lebih fundamental dari konflik, yaitu tindakan manusia sebagai sumber tanggung jawab moral.

Melalui dialog antara metafisika tindakan Thomistik dan personalisme Karol Wojtyła, artikel ini menunjukkan bahwa konflik institusional pada akhirnya harus dipahami sebagai peristiwa tindakan manusia. Dalam kerangka metafisika realistik, tindakan moral hanya mungkin terjadi ketika individu bertindak melalui pengetahuan intelektual dan kehendak bebas. Oleh karena itu, tanggung jawab moral tidak dapat sepenuhnya dipindahkan kepada sistem atau struktur organisasi. Institusi dapat menyediakan kerangka sosial bagi tindakan manusia, tetapi agensi moral tetap berakar

## **SELF-DETERMINATION DAN TANGGUNG JAWAB MORAL DALAM KONFLIK INSTITUSIONAL: PERSPEKTIF PERSONALISME KAROL WOJTYŁA**

pada pribadi sebagai subjek tindakan.

Personalisme Wojtyła memperdalam analisis ini dengan menunjukkan bahwa tindakan manusia memiliki dimensi refleksif yang membentuk identitas moral pelaku. Melalui proses *self-determination*, manusia tidak hanya mempengaruhi dunia eksternal melalui tindakannya, tetapi juga menentukan dirinya sebagai pribadi moral. Dengan demikian setiap tindakan moral memiliki makna ganda: ia menghasilkan konsekuensi eksternal dalam kehidupan komunitas sekaligus membentuk karakter moral individu yang bertindak.

Dalam cahaya perspektif ini, konflik institusional memperoleh makna filosofis yang lebih dalam. Konflik tidak lagi dapat dipahami hanya sebagai gangguan terhadap stabilitas organisasi atau sebagai kegagalan mekanisme institusional. Konflik juga merupakan situasi di mana hubungan antara kebebasan dan kebenaran menjadi sangat nyata. Dalam situasi konflik, individu sering dihadapkan pada pilihan yang sulit antara berbagai kemungkinan tindakan yang memiliki konsekuensi moral yang berbeda. Pilihan tersebut bukan sekadar keputusan strategis yang berkaitan dengan kepentingan organisasi. Sebaliknya, pilihan tersebut merupakan momen *self-determination* moral di mana individu menentukan hubungan mereka dengan kebenaran melalui tindakan mereka.

Analisis ini juga menunjukkan bahwa relasi antara pribadi dan komunitas tidak bersifat antagonistik. Dalam pemikiran Wojtyła, komunitas yang autentik bukanlah komunitas yang meniadakan kebebasan individu, tetapi komunitas yang memungkinkan partisipasi pribadi dalam pencapaian *common good*. Konflik institusional sering mengungkap ketegangan dalam relasi tersebut—ketegangan antara tuntutan stabilitas organisasi dan kebebasan moral individu. Dalam konteks ini, konflik dapat menjadi momen refleksi bagi komunitas tentang bagaimana ia memperlakukan kebebasan moral para anggotanya.

Kontribusi utama artikel ini terletak pada usahanya untuk menawarkan interpretasi personalistik terhadap konflik institusional. Alih-alih melihat konflik semata-mata sebagai kegagalan sistem organisasi, artikel ini menunjukkan bahwa konflik dapat dipahami sebagai peristiwa moral yang memperlihatkan hubungan antara kebebasan, kebenaran, dan komunitas dalam kehidupan manusia. Perspektif ini menantang kecenderungan modern untuk mereduksi tindakan manusia menjadi fungsi struktur sosial atau mekanisme institusional.

Pada akhirnya, konflik institusional mengingatkan kita pada sesuatu yang sangat mendasar tentang kondisi manusia. Manusia hidup dalam jaringan institusi, tradisi, dan komunitas yang membentuk kehidupannya. Namun bahkan dalam struktur sosial yang paling kompleks sekalipun, tindakan moral tetap berasal dari pribadi yang bebas dan bertanggung jawab. Oleh karena itu setiap konflik institusional pada akhirnya bukan hanya krisis organisasi, tetapi juga revelasi tentang kebebasan manusia sebagai pribadi yang menentukan dirinya dalam relasi dengan kebenaran.

Dalam perspektif ini, konflik tidak hanya harus diselesaikan; konflik juga harus dipahami. Sebab di dalam konflik, kehidupan moral manusia menjadi terlihat dengan cara yang sering tersembunyi dalam situasi normal kehidupan institusional. Ketika struktur sosial tidak lagi mampu menyerap ketegangan moral yang ada, tindakan manusia muncul dalam bentuknya yang paling jelas: sebagai keputusan bebas yang menentukan hubungan individu dengan kebenaran, dengan komunitas, dan dengan dirinya sendiri sebagai pribadi moral.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Aquinas, T. (1947). *Summa Theologica* (F. of the E. D. Province, Penerj.). Benziger Bros.
- Arianto, J. (2024). Gereja sebagai *Communio*: Implementasi dalam struktur hukum kanonik. *Gaudium Vestrum*, 6(2), 115–130.
- Brady, R. J. (2022). *Conforming to Right Reason: On the Ends of the Moral Virtues and the Roles of Prudence and Synderesis*. Emmaus Academic.
- Burgos, J. M. (2024a). *Personalism and the Common Good: Karol Wojtyła's Philosophical Anthropology*. Palgrave Macmillan.
- Burgos, J. M. (2024b). *The Common Good According to Karol Wojtyła: Between Individualism and Collectivism*. Wydawnictwo Wojtylianum.
- Casas, P. G. (2018). Wojtylian critique of Kantian morality and proposal of the unconditional personalist norm. *Carthaginensia*, 34, 29–48.
- Espartinez, A. S. (2023). Karol Wojtyła on Participation and Alienation. *Studia Gilsoniana*, 12(1). <https://doi.org/10.26385/SG.120102>
- French, P. A. (1984). *Collective and Corporate Responsibility*. Columbia University Press.
- Graff, J. (2024). Moral sensitivity and the limits of artificial moral agents. *Ethics and Information Technology*, 26(1), 13. <https://doi.org/10.1007/s10676-024-09755-9>

**SELF-DETERMINATION DAN TANGGUNG JAWAB MORAL DALAM KONFLIK  
INSTITUSIONAL: PERSPEKTIF PERSONALISME KAROL WOJTYŁA**

- Herminingsih, A. (2024). The Influence of Ethical Leadership and Ethical Culture on Ethical Behavior in Higher Education Institutions. *Journal of Public Policy and Institutional Review*, 3(2), 55–68.
- Hess, K. (2025). Corporate Moral Agency and the Limits of Collective Responsibility. *Journal of Social Philosophy*, 56(1), 85–103.
- Holub, G. (2025). The Unity of Consciousness and Freedom in Wojtyła's Personalism. *Studies in Christian Ethics*, 38(1), 52–67.
- Horowski, J. (2020). Christian Religious Education and the Development of Moral Virtues in the Thought of Thomas Aquinas. *Journal of Beliefs and Values*, 41(3), 347–361. <https://doi.org/10.1080/13617672.2020.1716034>
- Kim, S. (2023). Conservation conflicts and infrastructure development in Southeast Asia: Temporal mismatches and policy deadlock. *Land Use Policy*, 125, 106427. <https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2023.106427>
- Levinas, E. (1969). *Totality and Infinity: An Essay on Exteriority* (A. Lingis, Penerj.). Duquesne University Press.
- List, C., & Pettit, P. (2011). *Group Agency: The Possibility, Design, and Status of Corporate Agents*. Oxford University Press.
- López González, J. (2024). Dynamism of Human Action as a Key to Understanding Virtue Education. *Journal of Moral Theology and Education*, 13(1), 45–62.
- Pugu, M. R. (2025). The politics of time and development in Eastern Indonesia: Papua as a case of chronopolitical conflict. *Lex Localis – Journal of Local Self-Government*, 23(1), 1–22.
- Rassudina, K. (2019). THE ABILITIES OF THE HUMAN PERSON AND THE QUESTION OF FREEDOM. *Sophia. Human and Religious Studies Bulletin*, 13(1). <https://doi.org/10.17721/sophia.2019.13.15>
- Ricoeur, P. (1992). *Oneself as Another* (K. Blamey, Penerj.). University of Chicago Press.
- Spinello, R. (2024). Community, Participation, and the Common Good in Wojtyła. *Ethics and Politics*, 26(2), 201–220.
- Spinello, R. A. (2023). *The Enduring Relevance of Karol Wojtyła's Personalism for Contemporary Ethics*. Lexington Books.
- Wojewoda, M. (2021). Karol Wojtyła's Conception of Personhood in the Context of Reductionist Models. *Philosophical and Canon Law*, 7(2), 85–98. <https://journals.us.edu.pl/index.php/pcl/article/download/12253/9587>



Wojtyla, K. (2021). *“Person and Act” and Related Essays* (G. Ignatik & C. A. Anderson, Ed.). The Catholic University of America Press.